



Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Nonformal

Kartini Marzuki¹, Rudi Amir², Fatmawati Gaffar³

Universitas Negeri Makassar

Abstrak. Secara yuridis dan faktual pengakuan akan pentingnya pendidikan nonformal tidak diragukan lagi. Masyarakat sebagai stakeholder telah banyak merasakan betapa besar peran pendidikan nonformal dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Kurikulum merdeka saat ini menjadi suatu yang menarik menjadi kajian karena sejak setahun lalu mulai di sosialisasikan dan diterapkan secara bertahap. Namun pemerhatian pendidikan lebih fokus pada pendidikan formal. Penelitian ini mengungkap sejauh mana pendidikan nonformal dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Implementasi merdeka belajar pada satuan pendidikan nonformal dilaksanakan pada pokja PAUD dan Kesetaraan, dengan meninjau perangkat pembelajaran yang digunakan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian dicocokkan dengan Kompetensi di yang harus dicapai oleh peserta didik, setelahnya peserta didik akan mengikuti sepenuhnya rule yang ada; (2) Factor pendukung keterlaksanaan merdeka belajar pada satuan Pendidikan nonformal adalah: 1) memonitoring, 2) mengevaluasi, dari kedua tahapan tersebut akan menentukan berhasil tidaknya program merdeka belajar dilaksanakan. Oleh karena itu perlu dilakukan secara serius, terukur, transparan, dan akuntabel. 3) Peningkatan yang merupakan tahapan ketika standar tercapai kemudian ditingkatkan secara berkala dan berkelanjutan. Namun untuk tahap peningkatan ini biasanya berada pada level kebijakan; (3) Adapun factor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan merdeka belajar meliputi: 1) proses adaptasi kurikulum dengan program merdeka akan berdampak pada peserta didik dan tutor.

Kata Kunci: Pendidikan Nonformal, Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar

PENDAHULUAN

Kebijakan merdeka belajar sesungguhnya telah lama menjadi konsep dasar pendidikan nonformal. Hal ini dilandasi karena Pendidikan Nonformal (PNF) senantiasa memberikan layanan pendidikan kepada semua lapisan warga masyarakat yang tidak terbatas pada usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi serta tidak dengan ketat mensyaratkan tingkat pendidikan sebelumnya, agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan vokasional, pengembangan sikap dan kepribadian profesional, sehingga PNF dapat pula berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat. Bahkan para tokoh pendidikan nonformal menganggap bahwa PNF bukan lagi hanya sekedar pengganti anatau pelengkapn namun sudah merupakan alternatif pada semua orang yang akan menambah

pengetahuan dan keterampilannya dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa yang akan datang.

Tantangan pendidikan di masa depan akan semakin kompleks. Sistem pendidikan di masa depan itu akan menghadapi berbagai tantangan yang menuntut sejumlah pendekatan dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Tantangan tersebut tidak lagi bersaing dalam pengetahuan, tetapi persaingan dalam kreativitas, imajinasi, belajar, dan pola-pikir. Kondisi di masa depan juga menghadapi masalah Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity (VUCA) (Bennett & Lemoine, 2014).

Konsep merdeka belajar dalam pembelajaran yang dicanangkan oleh mendikbud Nadiem Makarim merupakan refleksi filosofi bapak pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara. Menurut bapak pelopor pendidikan ini, dalam menciptakan proses belajar yang baik, maka harus ada perencanaan pembelajaran, hal-hal yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan adalah memenuhi unsur-unsur belajar, adapun unsur-unsur belajar dalam pembelajaran adalah peserta didik, pendidik, tujuan belajar, asas belajar, dan metode belajar.

Untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki jiwa merdeka, pendidikan harus mendesain lingkungan belajar yang memungkinkan tumbuhnya murid merdeka yang memiliki kemandirian dan motivasi intrinsik yang tinggi, guru perlu terus berlatih meningkatkan kapasitas dirinya dalam memvisualisasi harapan, menggandeng sesama dan mentransformasikannya menjadi harapan bersama. Harapan itu adalah visi kita, visi kita adalah masa depan bangsa Indonesia (Aditya Darma, 2021).

Dalam Undang-undang system pendidikan Nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang. Selanjutnya pada pasal 26 dalam undang-undang tersebut dinyatakan "Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan".

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa secara yuridis dan faktual pengakuan akan pentingnya pendidikan nonformal tidak diragukan lagi. Masyarakat sebagai stakeholder telah banyak merasakan betapa besar peran pendidikan nonformal dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Berkurangnya angka buta aksara, banyaknya alumni dari program kejar PAket C yang berhasil menempuh pendidikan tinggi dan banyaknya petinggi-petinggi di negeri ini yang menggunakan ijazah dan sertifikat lembaga pendidikan nonformal, serta meningkatnya keterampilan masyarakat yang mengikuti lembaga-lembaga kursus menunjukkan betapa pendidikan nonformal berperan penting sebagai bagian dari system pendidikan di Indonesia.

Namun karena kebijakan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang senantiasa mengarahkan pada keseragaman dan kesetaraan pelaksanaan menyebabkan konsep merdeka belajar yang selama ini digunakan oleh pendidikan nonformal tergeser dan

terselenggara hampir sama dengan pendidikan persekolahan yang sifatnya menjadi kurang fleksibel. Institusi pendidikan nonformal yang saat ini disebut Satuan Pendidikan Non Formal terdiri dari Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB), Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau disingkat SPNF PKBM dan SPNF Lembaga Kursus dan pelatihan (LKP) dan Pondok pesantren Jumlah SPNF SKB di seluruh Indonesia sebanyak 431 lembaga dan SPNF PKBM sebanyak 9.377 lembaga. Sementara di Sulawesi Selatan SKB sebanyak 24 lembaga dan PKBM sebanyak 410 lembaga. Dari sejumlah lembaga pendidikan nonformal tersebut, pemerintah berharap, ketika kurikulum merdeka mulai dicanangkan, lembaga pendidikan nonformal juga sudah mulai menerapkan kebijakan tersebut. Namun ada beberapa hal yang belum dicermati mengenai kesiapan satuan pendidikan nonformal yaitu dari segi sumberdaya manusia, sarana dan prasarana terlebih lagi berkaitan dengan karakteristik peserta didik dari pendidikan nonformal yang khas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis ekspalanatoris. Menurut keyakinan penulis bahwa metode kualitatif yang menekankan kepada strategi interpretatif ini akan mampu sejauhmana implemetasi kebijakan merdeka belajar pada sataun-satuan pendidikan nonformal serta program-program yang diselenggarakan oleh satuan tersebut. Diharapkan juga akan mampu mengungkap secara analitik faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan merdeka belajar ersebut pada satuan pendidikan nonformal. Sebagai kasus yang diambil dari beberapa satuan pendidikan nonformal baik SKB, PKBM yang menyelenggarakan berbagai program, maka yan menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepala SBK, kepala pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) beserta tutor yang melaksanakan pembelajaran pada setiap program yang ada di sataun pendidikan baik program kesetaraan, program keaksaraan, dan program PAUD. Pengumpulan data direncanakan dengan studi dokumen, pengamatan langsung dan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) berdasarkan pengambilan informannya secara *purposive* melalui teknik *key informansampling* yaitu para informan dengan pengambilan spesifik yang dianggap menguasai permasalahan terutama dua tokoh kunci ketua kelompok dan (para) anggota kelompok yang akan dialogkan. Jumlah responden mengikuti prinsip *snowball sampling*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Satuan Pendidikan Nonformal Program Kesetaraan

Program Pendidikan Kesetaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan program kesetaraan yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum pendidikan kesetaraan dan kurikulum merdeka dengan mengkombinasikan belajar secara tatap muka langsung atau luring dan pembelajaran daring

menggunakan aplikasi seTARA Daring dari Kemdikbudristek. Penggabungan antara luring dan daring pun dilakukan untuk memberikan kemudahan dan kesesuaian capaian pembelajaran bagi peserta didik, sehingga dapat belajar kapan saja dan dimana saja.

Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Program Pendidikan Anak Usia Dini

Menganalisis implementasi kurikulum merdeka akan melibatkan beberapa aktivitas yang berkaitan dengan implementasi tersebut, mulai dari sosialisasi pada satuan-satuan pendidikan

a. Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka

Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka memberikan pemahaman kepada Kepala Bidang PAUD, pengawas/penilik, organisasi mitra PAUD serta mitra pembangunan terkait penerapan Kurikulum Merdeka di satuan PAUD sehingga dapat memberikan sosialisasi serta pendampingan yang diperlukan kepada satuan PAUD. Kegiatan Sosialisasi ini dibagi dalam 5 (lima) tahap dan dilaksanakan secara daring dengan mekanisme kegiatan penyampaian materi dan tanya jawab.

Menurut Ibu K (wawancara, Ketua Pokja PAUD) "Pada Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka dijelaskan bahwa Kurikulum Merdeka melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu holistik, berbasis kompetensi bukan konten serta kontekstualisasi dan personalisasi. Disampaikan juga bahwa Implementasi Kurikulum Merdeka untuk tahun pertama ini diperuntukkan untuk anak usia 5-6 tahun. Selain itu disosialisasikan tentang Karakteristik Kurikulum Merdeka serta pilihan Kurikulum yang dapat digunakan, yaitu Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat atau Kurikulum Merdeka.

Pada Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka ini disampaikan juga bahwa bagi satuan PAUD yang memilih menggunakan Kurikulum Merdeka untuk pembelajarannya, maka diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan sesuai dengan kesiapan satuan PAUD dalam mengimplementasikannya, pilihannya yaitu mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh AK (Tutor PAUD) bahwa "disosialisasikan juga pada kegiatan ini, peran dari pihak-pihak terkait diantaranya Dinas Pendidikan, Unit Pelaksana Teknis (BBGP/BB/BPMP), organisasi mitra serta mitra pembangunan". Lebih lanjut AB (Tutor PAUD) mengemukakan juga bahwa "rangkaiannya kegiatan sosialisasi ini juga memberikan pemahaman tentang langkah-langkah untuk mendaftar Implementasi Kurikulum Merdeka serta Platform Merdeka Mengajar (PMM)".

b. Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka

Bimbingan teknis Implementasi Kurikulum Merdeka merupakan salah satu strategi yang digunakan Direktorat PAUD untuk menyamakan persepsi dan

pemahaman antara Unit Pelaksana Teknis dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam mendampingi satuan PAUD mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan mengadvokasi satuan PAUD memanfaatkan Platform Merdeka Mengajar (PMM) secara mandiri.

Factor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Merdeka Belajar Pada Satuan Pendidikan Nonformal

1. Factor Pendukung

Berdasarkan pada penelitian ini terdapat beberapa factor pendukung yang dihadapi dari implementasi kurikulum Merdeka Belajar, diantaranya seperti pengadaan sosialisasi kemudian dimonitoring, dievaluasi, dari kedua tahap antara monitoring dan evaluasi tersebut akan menentukan berhasil tidaknya program merdeka belajar dilaksanakan. Kemudian, yang terakhir adalah adanya peningkatan yang merupakan tahapan ketika standar tercapai kemudian yang diawali dengan kebijakan ditingkatkan secara berkala dan berkelanjutan. Maka dengan demikian diharapkan pada akhirnya dapat menghasilkan lulusan (output) yang employability skill, yaitu memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang sesuai

2. Factor penghambat

Mengenai factor penghambat yang dihadapi dari implementasi dalam kerangka kebijakan kurikulum Merdeka Belajar. Salah satunya, selayaknya seperti yang dikemukakan oleh Ketua Pokja Kesetaraan, Bapak H untuk sosialisasi MBKM ini saja, Tentunya nanti akan ada banyak pertanyaan tentang suatu kebijakan yang mana tidak serta merta langsung bisa berjalan, karena perubahannya ini cukup drastis. Sebenarnya dimulainya kan dari OBE.. Hambatannya itu tadi, karena MBKM ini tergolong baru, jadi dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan itu belum tersistem, jadi masih enternya manual. Namun ini sudah ada flow chartnya, nanti akan dibuat oleh bagian Infokom dan nanti baru tersistem. Semua kegiatan sudah ada flow chart atau pun aturan detailnya tetapi itu tadi masih manual.

Ibu KH selaku Kepala UPT SPNF Makassar juga menyebutkan pendapat yang selaras, sebagai berikut: "...Kalau untuk tutor itu sering kali tidak toleran terhadap sistem yang dikembangkan. Sedangkan untuk peserta didik secara umum tergantung peserta didik tersebut. Karena kebijakan ini juga opsional, peserta didik diberikan kebebasan untuk mengambilnya atau tidak..."

Pembahasan

Pengembangan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari pembaharuan kurikulum, dalam tiap priode tertentu kurikulum selalu mengalami proses evaluasi. Bahkan tak sedikit yang beranggapan bahwa kurikulum itu berganti seiring pergantian pemangku kebijakan. Sebagai negara yang terus berinovasi dalam pengembangan kurikulum, Indonesia setidaknya telah mengalami lebih dari sepuluh

kali perubahan sejak awal kemerdekaan (Wiki Aji Sugiri dan Sigit Priatmoko, 2021).

Merdeka belajar diimplementasikan pada beberapa satuan Pendidikan nonformal diantaranya pada kelompok kerja (pokja) Pendidikan anak usia dini (PAUD) dan kesetaraan dengan melakukan sosialisasi kepada pihak pengelola, tutor dan mitra-mitra yang terkait agar proses pelaksanaannya dapat berjalan efektif. Selain itu, dilakukan juga bimbingan Teknik implementasi kurikulum merdeka agar para stakeholder memahami konsep dan praktis. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Yanuar HeryMurtianto (2013) bahwa "Penerapan merdeka belajar dalam pembelajaran, menggunakan sistem pembelajaran dan penilaian berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal (common sense) yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan peserta didik. Pembelajaran berdeferensiasi adalah pembelajaran yang dimodifikasi dan dikembangkan melalui sistem pembelajaran yang dapat memacu dan memwadahi integrasi antara pengembangan spiritual, logika, nilai-nilai atika, estetika, serta dapat mengembangkan kemampuan holistic, sistemik, linear, konvergen, untuk memenuhi tuntutan masa kini dan masa yang akan datang".

Proses pembelajaran pada konsep merdeka belajar ini tidak menitik beratkan hanya pada aspek pengetahuan saja yang bergelut sekitar angka-angka, tapi juga pada rana psikomotorik dan afektif menjadi perhatian dan tujuan pembelajaran dan kedua aspek inilah yang akan menjadi life skill bagi peserta didik.

Factor pendukung dan penghambat keterlaksanaan merdeka belajar

Pelaksanaan kebijakan merdeka belajar dipengaruhi oleh factor pendukung dan penghambat yang tentunya dapat berjalan efektif apabila factor tersebut dapat teratasi dalam bentuk Kerjasama dari semua pihak terkait. Dengan program akademik yang sesuai dan berkualitas, peserta didik dapat belajar secara mandiri (Alqahtani et al., 2021). Kondisi ini sangat tepat karena selama ini proses pembelajaran lebih banyak dilakukan secara daring. Lebih lanjut, kesesuaian program akademik yang dialami peserta didik dapat diterapkan pada masalah praktis untuk mengembangkan sistem pembelajaran adaptif (Yang et al., 2013) sesuai tuntutan kebijakan merdeka belajar saat ini.

Dengan interaksi langsung, siswa dapat menggunakan aplikasi dan peralatan untuk mempersonalisasi konten pembelajaran berdasarkan latar belakang akademik masing-masing mahasiswa sebelumnya dan yang sudah ada. Inisiatif yang tepat untuk memfasilitasi lingkungan pembelajaran online dapat mendorong keterlibatan antar-mahasiswa dan siswa-kefakultas, serta mendorong siswa bagaimana bekerja dalam kelompok (Qu et al., 2019)

SIMPULAN

1. Implementasi merdeka belajar pada satuan pendidikan nonformal dilaksanakan pada pokja PAUD dan Kesetaraan, dengan meninjau perangkat pembelajaran yang

digunakan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian dicocokkan dengan Kompetensi di yang harus dicapai oleh peserta didik, setelahnya peserta didik akan mengikuti sepenuhnya rule yang ada.

2. Factor pendukung keterlaksanaan merdeka belajar pada satuan Pendidikan nonformal adalah: 1) memonitoring, 2) mengevaluasi, dari kedua tahapan tersebut akan menentukan berhasil tidaknya program merdeka belajar dilaksanakan. Oleh karena itu perlu dilakukan secara serius, terukur, transparan, dan akuntabel. 3) Peningkatan yang merupakan tahapan ketika standar tercapai kemudian ditingkatkan secara berkala dan berkelanjutan. Namun untuk tahap peningkatan ini biasanya berada pada level kebijakan.
3. Adapun factor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan merdeka belajar meliputi: 1) proses adaptasi kurikulum dengan program merdeka akan berdampak pada peserta didik dan tutor. Karena hal ini berawal pada tahun ajaran 2021 /2022 dan 2022/2023 memakai standar kurikulum merdeka belajar di tahun tersebut juga. Tetapi 2012 mulai sepenuhnya menerapkan merdeka belajar; 2) untuk penulisan evaluasinya belum seluruhnya selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Darma. 2020. *Program Pendidikan Guru Penggerak*, (Modul 1.3 Visi Guru Penggerak). Jakarta.
- Alqahtani, R., Kaliappen, N., & Alqahtani, M. (2021). *A Review Of The Quality Of Adaptive Learning Tools Over Non-Adaptive Learning Tools*. *International Journal for Quality Research*, 15(1), 45–72. <https://doi.org/10.24874/IJQR15.01-03>
- Bennett, N., & Lemoine, G. J. (2014). *What a difference a word makes: Understanding threats to performance in a VUCA world*. *Business Horizons*, 57(3), 311–317. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2014.01.001>.
- Qu, Y., Cai, R., & Haj-Hussein, M. 2019. *Research and Practice of Applying Adaptive Learning in Computer Science and IT Degree Programs*. 2019 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), 1– 8. <https://doi.org/10.1109/FIE43999.2019.9028374>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wiki Aji Sugiri dan Sigit Priatmoko, *Perspektif Asesmen Autentik sebagai Alat Evaluasi dalam merdeka belajar*, dalam *Jurnal Pendidikan Guru Madrasah* ,Volume 4 No.1 , h.53. <https://core.ac.uk/download/pdf/322523218.pdf> (diakses 15 Maret 2021), h,53.
- Yanuar Hery Murtianto. 2013. *Pengembangan Kurikulum Berdeferensiasi Mata Pelajaran Matematika SMA untuk Siswa berbakat dan Cerdas Istimewa di Kelas Akselerasi Tesis* (Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret).